

DIALOG DAN REFLEKSI
MASA DEPAN
PLURALISME
DI INDONESIA

JAKARTA, 30 AGUSTUS 2008

SEPULUH TAHUN SESUDAH REFORMASI

Oleh
FRANZ MAGNIS-SUSENO

10 TAHUN SESUDAH REFORMASI

10 tahun sesudah reformasi, 63 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan dan 100 sesudah permulaan Kebangkitan Nasional. Intoleransi masih dan bahkan semakin menjadi masalah (seperti misalnya dilihat dari kasus Achmadiyah). Tetap masih 40% bangsa Indonesia hidup dalam kemiskinan atau hanya pas di luar kemiskinan. Tahun berat 2009 sudah melemparkan bayang-bayangnya, menunjukkan bahwa kehidupan demo-

kratis tidak beres. Gregetnya KPK –suatu kemajuan– memperlihatkan betapa kelas politik dan sistem yudisial sudah ke-rasukan korupsi. Rakyat mengharapkan kepemimpinan yang menunjukkan jalan ke luar, tetapi tidak kelihatan.

Uraian ini akan saya bagi dua. *Pertama*, saya mau menguraikan lima tantangan bagi bangsa Indonesia yang saya anggap paling serius. *Kedua*, saya ingin mengemukakan tiga tugas besar nasional yang menantang kita dan yang harus kita laksanakan apabila kita mau menggolkan masa depan Indonesia.

I. LIMA TANTANGAN YANG DIHADAPI BANGSA INDONESIA

Lima tantangan ini adalah (1) globalisasi, (2) egoisme dan kepikiran perasaan kedaerahan, (3) budaya konsumerisme hedonistik, (4) korupsi, dan (5) ideologi-ideologi totaliter. Saya akan berfokus pada tantangan ketiga dan kelima

(1) GLOBALISASI

Dengan globalisasi saya maksud perkembangan tak tertahan sedunia yang membuat kita masing-masing tergantung dari apa yang terjadi di tempat mana pun di dunia. 400 yang lalu, bagaimana hubungan antara Birma dan Thailand saja tidak akan berpengaruh pada Mataram. Tetapi sekarang kualitas

panen kopi di Brasil langsung mempengaruhi apakah jutaan petani kopi Indonesia bisa sejahtera atau tidak.

Globalisasi menyatakan diri terutama dalam tiga wilayah: Dalam bidang lalu lintas, dalam bidang komunikasi berjarak dan dalam bidang ekonomi. Jelaslah bahwa globalisasi merupakan tantangan menyeluruh: Kita dapat ke mana-mana (asal punya duit), jadi tidak lagi dengan mudah dapat dikuasai di satu tempat. Kita dalam sekejap mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia. Melalui media komunikasi juga kekayaan dan perbedaan budaya sedunia masuk ke dalam lingkup hidup kita. Termasuk kesadaran bahwa ada model etika kehidupan yang berbeda, yang barangkali lebih baik, atau lebih menarik. Totalitarisme budaya sendiri untuk selamanya terdabrak. Termasuk totalitarisme keagamaan yang mau membuat kita percaya bahwa tak ada proyek-proyek keagamaan dengan etika dan nilai-nilai yang tidak kalah luhurnya daripada yang menjadi biasa bagi kita. Dan globalisasi ekonomis berarti bahwa perekonomian kita terkait dalam jaringan ekonomi sedunia.

Semboyan-semboyan nasionalisme klasik tidak berdaya sama sekali. Apalagi sejak Cina menunjukkan bagaimana suatu negara yang potensial raksasa bisa maju cepat asal membuka diri. Jadi nasionalisme kita seluruhnya tertantang. Kalau nasionalisme kita diharapkan mau terus merupakan kekuatan

yang mempersatukan bangsa, maka nasionalisme tidak boleh sloganistik. Kita harus mendefinisikan kembali apa arti *keta-hanan nasional, identitas nasional, kepentingan nasional, ke-kuatan sebagai bangsa*. Yang jelas, jalan ke masa depan tidak dapat terletak dalam isolasi. Bangsa tidak akan maju tanpa komunikasi, maka kemampuan kita untuk berkomunikasi, da-lam semua dimensi, harus ditingkatkan. Substansi perekono-mian harus kita perkuat. Sekian diskusi tentang *neo-liberal-isme* percuma, hanya mengalihkan perhatian dari tugas untuk secara efektif memperkuat basis ekonomis bangsa.

(2) KEPICIKAN PERASAAN KEDAERAHAN

Yang dimaksud di sini bukan separatisme – yang tentu juga bisa menjadi ancaman. Melainkan bahwa otonomi daerah yang baru merangsang nafsu para "putera dan puteri daerah" untuk menguasai semua tempat "basah", syukur kalau demi untuk memajukan daerah, namun sering juga hanya untuk memperkaya diri pribadi. Semakin posisi-posisi politis dilihat sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, semakin mereka akan melupakan tugas panggilan untuk bekerja tanpa pamrih bagi kepentingan umum di daerahnya. Mereka bisa kehilang-an wawasan dan perasaan solidaritas bangsa dan tanggung-jawab mereka atasnya. Bisa terjadi diskriminasi terhadap para "pendatang", sebagai arus balik terhadap sentralisme yang

begitu lama membungkamkan aspirasi daerah. Namun tetap harus diperhatikan bahwa perbedaan antara putera-puteri daerah dan pendatang tidak mempunyai dasar apa pun dalam undang-undang dasar dan sistem hukum negara dan bisa betul-betul mengancam persatuan dan kesatuan negara.

(3) BUDAYA KONSUMERISME HEDONISTIK

Dua tantangan pertama tadi, globalisasi dan kepicikan wawasan kedaerahan, menantang kita dari luar. Tetapi konsumerisme menantang kemanusiaan kita dari dalam. Ada baiknya kalau kita sedikit merefleksikannya.

Secara sederhana: *Konsumerisme* adalah nafsu untuk membeli demi membeli. Bukan kebutuhan nyata yang menjadi sebab saya membeli sesuatu di *mall*, melainkan karena saya suka beli-beli. *Shopping* sebagai bentuk rekreasi. Yang kelihatan *asyik*, yang *trendy*, yang *in*, yang lebih baru, itulah yang mau dibeli. Dunia iklan sebagian besar memainkan nafsu itu. Bukan bahwa orang memerlukan sesuatu, atau memang meminati sesuatu biar agak luks itulah masalah konsumerisme, melainkan bahwa dia beli untuk beli. Umpamanya berhasil membeli *handy* yang betul-betul canggih dan praktis: Berikut kali dia lewat tempat *handy* yang *asyik* ia akan membeli lagi. Handy yang sudah dibeli, yang barangkali mahal, tetapi

sangat cocok dengan semua kebutuhannya, dilupakan. Yang menarik adalah *membeli handy*, bukan *handynya*.

Kebutuhan untuk terus membeli yang lebih baru, lebih *trendy*, lebih asyik, secara canggih dimanipulasi oleh promosi di semua media. Orang dibikin malu kalau tidak terus membeli yang paling akhir. Orang disarankan bahwa ia akan *happy* apabila memiliki produk paling baru. Ia dibikin percaya bahwa kesulitan berkomunikasi akan hilang apabila membeli shampoo anti ketombe dst.

Apa ciri khas konsumerisme itu? Bahwa tidak ada akhir di perjalanan itu. Konsumerisme merupakan suatu ketagihan yang, sama dengan semua ketagihan, membuat orang kehilangan orientasi, kehilangan perasaan untuk proporsi, kehilangan kesanggupan dan kemauan untuk mempertimbangkan lebih dulu apa yang nyata-nyata dibutuhkan dan apakah situasi keuangannya memungkinkan pembelian baru.

Masalahnya adalah bahwa konsumerisme itu tidak mengenal batas. Kalau hanya menyangkut *spray* kulit atau *handy*, masih mendingan. Tetapi ukuran kebutuhan, ketagihan itu, bertambah terus. orang menjadi ketagihan *life style* yang mahal-mahal, ke disko atau tempat makan yang mahal, perjalanan yang mahal. Tak ada batasnya. Dan kalau uang tidak

cukup, ia merasa, persis orang yang ketagihan, tanpa semangat, lesu, ia tak mampu lagi bekerja – sampai ia bisa lagi melayani *spending habitsnya* yang semakin di luar segala proporsi.

Konsumerisme itu mengancam seluruh bagian atas masyarakat kita. Hanya karena itu sukses sekian banyak *mall* bisa dijelaskan. Fokus pada konsumsi makin mewah ini seakan-akan memudahkan semua perhatian lain; perhatian pada komunikasi sejati dalam keluarganya, terhadap politik, terhadap profesi. Dana, itulah yang diperlukan, dan akhirnya cara apa pun tidak akan ditolak untuk melayani ketagihan itu.

Akan tetapi, konsumerisme bukan hanya ancaman bagi elit kita, bagi mereka yang sudah berada, melainkan juga bagi mereka yang jelas-jelas tidak dapat memenuhinya. Orang kecil pun melihat gaya hidup seperti itu. Masuk ke kalangan mereka, itulah yang menjadi cita-citanya. Rasa iri maupun rindu itu mengancam mengkorupsikan orientasi hidup kalangan berpendapatan rendah juga. Tak dapat diragukan, konsumerisme merupakan bahaya besar bagi substansi etis dan sosial masyarakat kita.

(4) KORUPSI

Secara praktis-konkret saya menganggap korupsi sebagai ancaman terbesar yang dihadapi negara kita. Soalnya, korupsi menggerogoti substansi kebangsaan kita: Substansi moral, substansi sosial, kompetensi-kompetensi yang kita miliki. Korupsi membuat kita dari atas sampai ke bawah menjadi orang yang tidak jujur. Itu fatal. Orang yang tidak jujur tidak lagi tahu apa itu keadilan. Ia tidak tahu apa arti tanggungjawab. Dan ia tidak lagi meminati mutu outputnya. Karena itu kompetensi-kompetensi yang barangkali dimiliki menjadi tidak efektif karena bukan kualitas outputnya, melainkan keuntungan pribadi yang menjadi motivasinya. Kalau kita tidak berhasil memberantas korupsi, bangsa kita akan gagal.

Catatan keras ini harus cukup. Korupsi erat sekali berkaitan dengan konsumerisme yang mengasingkan kita dari diri kita yang sebenarnya. Korupsi juga yang memotori egoisme kedaerahan (dan bukan keinginan untuk memajukan daerah kita). Dan bau kebusukan masyarakat yang korup sampai ke tulang sumsumnya akan membuka pintu bagi tantangan yang kelima, serangan ideologi-ideologi totaliter, khususnya yang berlatar belakang agama.

(5) EKSKLUSIVISME KEAGAMAAN

Dengan eksklusivisme keagamaan di sini tidak dimaksud ajaran-ajaran bahwa hanya penganut agama tertentu bisa masuk surga dsb. Melainkan gerakan-gerakan politik yang mau memaksakan paham mereka tentang agama (mereka) kepada masyarakat. Eksklusivisme keagamaan itu merupakan sebuah ideologi, ideologi-ideologi dalam beberapa bentuk yang sejak 30 tahun menggantikan ideologi-ideologi totaliter sekuler kiri kanan yang makin pudar.

Eksklusivisme keagamaan adalah lawan seratus persen dari konsumerisme. Ia melihat bahaya konsumerisme dan memanfaatkan kekosongan spiritual konsumerisme untuk mengisinya dengan keagamaan totaliter. Totaliter karena mau memaksakan pendapat mereka kepada orang lain, karena mereka yakin memiliki kebenaran mengenai totalitas kehidupan, persis sama dengan Marxisme-Leninisme almarhum, hanya bukan berdasarkan sebuah filsafat sejarah (Marxisme), melainkan berdasarkan suatu keyakinan beragama.

Eksklusivisme itu ancaman besar karena para pembawanya berpendapat bahwa mereka tahu kehendak Allah. Mereka mengklaim berpartisipasi dalam kemahatahuan Ilahi sehingga tidak perlu bertanya, melainkan hanya menjawab saja.

Eksklusivisme keagamaan semakin menjadi ancaman bagi kita di Indonesia juga. Eksklusivisme keagamaan merupakan pembatalan konsensus yang mendasari eksistensi negara dan bangsa Indonesia karena konsensus itu memuat kesediaan untuk menghormati identitas segenap komponen bangsa. Identitas itulah yang tidak dihormati oleh kaum eksklusif. Karena mereka tahu apa yang baik dan benar bagi semua dan hal itu akan, kalau mereka dapat, dipaksakan.

Karena itu eksklusivisme keagamaan mengancam hakekat kebangsaan. Mereka mau memaksakan keseragaman religius terhadap masyarakat yang pada hakekatnya majemuk, mereka tidak bersedia mengakui kekhasan adat, kebiasaan, budaya dan pola keagamaan masing-masing komponen bangsa. Karena itu di antara kaum eksklusif terdapat yang tidak ragu-ragu memakai ancaman dan kekerasan. Mereka juga mengancam harkat etis dan kemanusiaan kehidupan bersama masyarakat karena mau menghapus kebebasan orang untuk mengikuti suara hati, terutama di bidang agama. Padahal kebebasan suara hati merupakan pengakuan masyarakat terhadap jantung moralitas warga-warganya. Karena mereka hanya mengakui aturan dan hukum agama, mereka menyangkal ke-

kayaan nilai kemanusiaan yang tertanam dalam tradisi maupun yang menjadi keyakinan umat manusia, sebagaimana terutama terungkap dalam hak-hak asasi manusia.

Dan mereka juga mengancam kebebasan-kebebasan demokratis yang kita peroleh sesudah Soeharto turun tahta: Kebebasan untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis, kebebasan untuk berkumpul dan beribadat, kebebasan pers, kebebasan mencari informasi, kebebasan untuk membaca apa yang dikehendaki sendiri.

II. TIGA TUGAS BAGI BANGSA INDONESIA

Bagaimana kita dapat menghadapi tantangan-tantangan terhadap harkat kebangsaan manusia Indonesia itu? Tentu, yang paling penting adalah bahwa kita jadi menyadari lima tantangan itu dan secara pribadi bertekad untuk tidak menyerah kepadanya. Tetapi kita juga harus melawan dengan memperjuangkan dan memastikan nilai-nilai politik positif yang memiliki prioritas tertinggi dan bahkan mendasar bagi negara kita. Tiga nilai itu, dalam keyakinan penulis, adalah pluralisme, demokrasi dan keadilan sosial.

1. PLURALISME

Pluralisme adalah tak lain kesediaan untuk menjunjung tinggi pluralitas. Pluralisme tidak berarti menyatakan bahwa semua

agama sama saja, tidak ada kaitan dengan pertanyaan manakah agama yang benar dan mana yang saya anggap paling baik. *Pluralisme* adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, budaya dan keyakinan agama yang berbeda dan bersedia hidup, bergaul dan bekerja bersama dan bersedia membangun negara kita bersama dengan mereka. Dan karena itu pluralisme merupakan syarat mutlak agar Indonesia yang begitu plural dapat tetap bersatu. Pluralisme tidak hanya berarti membiarkan pluralitas, melainkan memandangnya sebagai sesuatu yang positif. Karena seorang pluralis menghormati dan menghargai sesama manusianya dalam identitasnya, dan itu berarti juga dalam perbedaannya. Seorang humanis dengan sendirinya seorang pluralis.

Kita dapat bersikap pluralis karena kita tahu dan mengakui bahwa mereka yang berbeda budaya dan keyakinan agamanya dari kita mempunyai nilai-nilai yang sama dengan kita. Mereka pun sama dengan kita tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Mereka pun merindukan kejujuran, keadilan, kebesaran dan kebaikan hati serta bersedia memaafkan dan berbelaskasih. Di zaman pasca tradisional nilai-nilai yang luas diyakini dalam masyarakat adalah hormat terhadap keutuhan

setiap manusia, penolakan pemakaian kekerasan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, kebebasan beragama, berpendapat dan berekspresi, solidaritas dengan kaum miskin dan tertindas, pluralitas ekspresi-ekspresi kultural, toleransi seluas-luasnya selama tidak ada orang terinjak, penolakan terhadap kejahatan dan ketidakadilan dengan alasan apa pun, kita tahu bahwa sengaja melukai, menyakiti, menghina orang lain adalah jahat, bahwa orang lain wajib kita hormati sebagai manusia tanpa membedakan menurut gender, keyakinan agama dan politik, ras, ciri budaya dan kedudukan sosial. Di negara kita ini kebersamaan nilai terungkap dalam Pancasila. Itulah yang mempersatukan kita warga negara Indonesia yang berbeda budaya, ras, bahasa ibu, agama atau keyakinan agamanya. Dan karena itu kita, meskipun berbeda satu sama lain, bisa hidup bersama dengan baik dan bersatu dalam satu negara. Nilai-nilai kita itu sudah termasuk identitas kita. Justru karena itu identitas kita yang juga ditentukan oleh budaya, ras, bahasa ibu dan keyakinan beragama perlu dihormati dan tidak boleh dicoba diseragamkan. Segala usaha untuk menyeragamkan masyarakat Indonesia menurut paham-paham ideologis, entah sekuler, entah agamis, memperkosa identitas nyata manusia-manusia Indonesia, dan pemerkosaan itu merupakan sesuatu yang jahat, serta, tentu

mengancam kebangsaan karena Indonesia yang majemuk hanya dapat menjadi satu bangsa apabila kemajemukan itu justru terjunjung oleh persatuannya.

Dalam dimensi politik pluralisme membawa keharusan untuk menata Indonesia secara inklusif. Artinya, undang-undang dasar dan sistem hukum dan peraturan harus menjamin identitas dan kekhasan masing-masing komponen bangsa dan menangkis segala usaha untuk menindasnya. Inklusivitas itu terancam, apabila pandangan budaya atau agama kelompok tertentu mau dipaksakan kepada yang lain. Eksklusivisme ideologis akan menyingkirkan dan menindas cara orang membawa diri yang tidak sesuai dengan ideologinya itu. Eksklusivisme itu adalah tak lain kediktatoran orang-orang yang mengangkat diri sendiri sebagai hakim mengenai benar dan salah kehidupan saudara-saudaranya. Mereka mengklaim menindas semua yang tidak mengikuti keyakinan mereka. Tetapi tak ada manusia yang bisa mengangkat diri menjadi hakim atas benar dan salah kehidupan orang lain. Dalam masyarakat beradab rambu-rambu kelakuan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima ditetapkan dalam undang-undang atas dasar undang-undang dasar. Di Indonesia perangkat itu tersedia dan berdasarkan Pancasila.

2. DEMOKRASI

Adalah keyakinan penulis bahwa Indonesia hanya mempunyai masa depan sebagai demokrasi. Kita sudah jenuh dengan pengalaman diktator-diktator. Merekalah yang bertanggung jawab atas banyak kerusakan lahir batin yang selama ini dialami bangsa Indonesia. Sejelek-jeleknya demokrasi kita sekarang, tak ada alternatif kecuali untuk membuatnya berhasil. Negara yang seruwet, semajemuk Indonesia tidak bisa dipersatukan dengan paksaan. Indonesia hanya akan tetap bersatu apabila semua komponen bangsa mau bersatu dan mereka hanya akan mau bersatu apabila mereka dapat ikut mengurusnya. Itulah yang dijamin oleh demokrasi.

Terhadap demokrasi hanya ada tiga alternatif: Pemerintahan feodal di mana pemimpin dituruti karena dipercayai telah menerima wahyu. Kediktatoran militer. Dan teokrasi, kediktatoran para pendeta, kaum ideolog agamis, barangkali dalam kombinasi dengan kediktatoran militer. Tiga pola pemerintahan itu tidak bisa membawa Indonesia ke masa depan yang menjanjikan.

Maka mekanisme-mekanisme demokratis, hak-hak asasi manusia, kebebasan-kebebasan demokratis, dan ketaatan terhadap hukum harus kita bela dan kita kembangkan. Bukan mengeluh tentang segala macam kekurangan politik kita yang

memang tidak bisa disangkal, melainkan usaha untuk membuat demokrasi kita berhasil, itulah yang dituntut dari kita.

3. KEADILAN SOSIAL

Keadilan sosial adalah bottom line harkat etis sebuah negara. Negara harus adil. Kiranya tak salah kalau akar kebanyakan ketegangan dan konflik yang kita alami sampai sekarang kita lihat dalam ketidakadilan yang terus-menerus dialami oleh banyak lapisan masyarakat. Padahal sejak semula para pendiri negara bercita-cita membangun masyarakat yang adil. Apa artinya adil? Adil itu berarti pertama-tama bahwa ketidakadilan-ketidakadilan kasar kita hapus. Adil berarti, bahwa seluruh bangsa, segenap insan Indonesia dapat hidup utuh sebagai manusia dan utuh sebagai warga negara. Dan itu hanya mungkin apabila kebutuhan dasar segenap insan Indonesia dapat terpenuhi. Maka penciptaan kondisi-kondisi yang memungkinkan segenap warga bangsa dapat menjamin kebutuhan-kebutuhan dasarnya harus menjadi prioritas pembangunan yang diprakarsai oleh negara.

Pewujudan keadilan sosial adalah tuntutan solidaritas bangsa. Solidaritas itulah dasar persatuan sebuah bangsa yang majemuk. Bukti solidaritas sosial suatu bangsa adalah bagaimana ia memperlakukan warga-warganya yang paling lemah: mereka yang miskin, kelompok-kelompok minoritas,

para perempuan, semua mereka yang tidak dapat membantu mereka sendiri. Mereka itu harus diberi prioritas dalam kebijakan pembangunan negara. Hanya dengan demikian kita dapat mencegah bahwa bangsa Indonesia terpecah menjadi dua: Mereka yang cepat maupun pelan-pelan ikut terangkat oleh kemajuan ekonomis, dan mereka, lebih dari 100 juta bangsa Indonesia, yang harus hidup dari dua dollar atau kurang per hari, yang mengalami setiap hari sebagai pergulatan baru untuk bisa makan di hari berikut. Keterperpecahan bangsa ini tidak boleh kita biarkan. Kita wajib membuat nyata solidaritas bangsa.

PENUTUP

Sebagai kata terakhir. Kita umat Kristianilah yang ditantang juga. Kita pun bertanggungjawab atas masa depan bangsa Indonesia. Kita harus melibatkan diri secara positif, kita harus "sepi ing pamrih", tidak hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, kita harus ke luar dari perspektif minoritas yang selalu berpusat pada dirinya sendiri. Tidak boleh ada yang merasa terancam karena kita. Segala kelakuan provokatif perlu kita singkirkan. Menjadi pembawa injil tidak berarti mengganggu orang, melainkan memberikan kesaksian karena kebaikan, kepositipan hidup kita.

Satu catatan lagi. Hubungan Kristiani – Muslim merupakan kunci masa depan Indonesia. Kita pun harus memberikan sumbangan. Masa depan Indonesia untuk sebagian tidak kecil akan tergantung apakah umat Kristiani dan umat Islam dapat hidup bersama dengan baik, dapat saling percaya dan tidak lagi takut satu sama lain. Kita pun harus memberikan sumbangan. Maka kita harus bisa kritis terhadap kita sendiri, harus peka terhadap apa yang dirasa provokatif dan memusuhi, atau menakutkan, oleh agama-agama lain di Indonesia, khususnya Islam, tetapi juga umat Buddha. Hal kristenisasi, hal mau pamer dengan gedung-gedung mentereng, perpecahan di mana kita tidak bisa kerja sama, semua itu menggelapkan kesaksian kita tentang Kristus. Kerajaan Allah terdiri atas "keadilan, perdamaian dan kegembiraan dalam Roh Kudus" (Rum 14,17). Itulah yang perlu kita pancarkan ke dalam masyarakat.

HHH